

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi A. Mallarangeng & M. Ryaas Rasyid, 1999, *Otonomi dan Federalisme Dalam Buku Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kompas.
- Asshidiqqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.
- Asshidiqqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- DPR RI, 2012, *Laporan Kunjungan Kerja Pansu RUU Tentang Pemerintahan Daerah ke Perancis*, DPRRI, Jakarta.
- Humes IV, Samuel, 1991, *Local Governance and National Power*, IULA, London.
- Gadjong, Agussalim Andi, 2007, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kaho, Josef Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Khairi, Halilul, 2022, *Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi*, Otonomi Daerah: Gagasan dan Kritik (Refleksi 20 Tahun KPPOD), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- La Nora, Ghazaly Ama, 2014, *Ilmu Komunikasi Politik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Lubis, M. Solly, 1983, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, 2004, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Konstitusi dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, 2000, *Mensiasati Otonomi Daerah, Konsorsium pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press"*, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, et. al, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sirajudin Dkk, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang.
- Soehino, 1995, *Perkembangan Pemerintahan di daerah*, Liberty, Yogya.

- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sri Soemantri M, 1991, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, CV Rajawali, Jakarta.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suratman dan Phiphils Dillah, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Supriatna, Tjahya, 1999, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafrudin, Ateng, 1990, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Syukur, Abdullah, 1987, *Study Implementasi Lalar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta.
- Yuliandri, 2009, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, RajaGrafindo, Jakarta.

#### **Jurnal**

- Setiawan, Dian Bakti, “Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur Dalam Kedudukan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”, *Unes Law review*, Volume 5 Issue 2 Desember 2022.
- Siregar, Nurliana Br, “Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi,” *JOM Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.
- Sutrisno, Edy, “Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” *Jurnal Desentralisasi*, Volume 13, No.1, 2015.
- Nugraha, Harry Setya, “Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal de Jure*, Volume 13 Nomor 2 Oktober 2021.
- Nova, Herlina, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat POLRI Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4, September-Desember, 2018
- Yuslim, “Gagasan Pengaturan Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Setelah Perubahan Undang Undang Dasar 1945,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No. 2 Mei – Agustus 2013.

#### **Perundang-Undangan**

- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara R.I Tahun 2014 Nomor 244.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara R.I Tahun 2010 Nomor 25.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara R.I Tahun 2017 Nomor 73.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Lembaran Negara R.I Tahun 2018 Nomor 109.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

**Web** <https://setkab.go.id>  
<https://www.detik.com>  
<https://www.cnnindonesia.com>  
<https://www.kompas.tv>

